



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Gejolak ekonomi tahan APBN 2025
Tanggal : Jumat, 16 Agustus 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Gejolak Ekonomi Tahan APBN 2025

Untuk satu tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto, program-program prioritas terpaksa harus dijalankan secara bertahap.

INSI NANTIKI JELITA
insi@mediaindonesia.com

PRESIDEN Joko Widodo hari ini membacakan nota keuangan yang memberikan kisi-kisi program pemerintahan tahun depan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Kendat turut menampung program presiden terpilih, penyusunan itu hakal lebih realisit dan konservatif mengingat masih tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Ekonom Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin, mengatakan kondisi global turut menekan kinerja berbagai sektor usaha seperti dari manufaktur. Rasio pajak pun cenderung stagnan, ditambah dengan deflasi beberapa bulan terakhir yang mengindikasikan melandaanya daya beli masyarakat.

"Penyesuaian-penyesuaian harus dilakukan di tengah perlakuan anggaran. "APBN yang sudah konservatif tersebut bisa jadi akan dikoreksi di tengah jalan melalui pengajuan APBN perubahan," ucap Wijayanto kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Untuk satu tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto Cibran Rakabuming Raja, menurut ekonom senior Raden Pardede, program prioritas akan dijalankan secara

bertahap atau gradual. Pasalnya, tidak mudah menaikkan penerimaan negara di tengah gejolak ekonomi. "Kulau pencitraan negaranya bisa naik, katakan ke 18% saja, maka dia akan tidak mewujudkan program-program dia secara langsung. Oleh karenanya, realisasi program dilakukan secara gradual," ujar Raden.

Salah satu program prioritas Prabowo yang sudah mendapatkan pengalokasian anggaran di 2025 ialah makan bergizi gratis, yakni sebesar Rp71 triliun. Total kebutuhan anggaran program tersebut bisa dilaksanakan sepenuhnya mencapai lebih dari Rp400 triliun per tahun.

Di sisi lain, Prabowo telah menegaskan akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berupaya memperkuat proyek pemindahan ibu kota negara tersebut di era pemerintahannya.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menurunkan untuk mengakomodasi program-program Prabowo-Gibran, perlu kebijakan fiskal yang ekspansif guna menaikkan belanja negara. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan fokus pada stabilitas ekonomi dan politik, serta penyederhanaan regulasi.

Empat Prioritas Anggaran

10 Tahun Pemerintahan Jokowi



Keterangan: *Outlook **RAPBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

	2024	2025
Pertumbuhan ekonomi (%):	5,2	5,1-5,5
Tingkat inflasi (%):	2,8	1,5-3,5
Nilai tukar (Rp/USS):	15.400-15.200	15.300-15.900
Tingkat suku bunga SBN 10 tahun (%)*:	6,49-6,91	6,8-7,2
Lifting minyak (ribu barel/hari):	615-640	580-601
Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari):	1.003-1.047	1.003-1.047



Poin Penting dalam Pidato Kenegaraan 2023

- Mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah, TNI, dan Polri sebesar 8% pada 2024.
- Menyalin gaji pensiun sebesar 12% pada 2024.
- Memastikan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Prediksi Isi Pidato Kenegaraan 2024

- Terdapat dua program unggulan pada RAPBN 2025, yaitu program siang berseri gratis untuk anak sekolah, anak balita, dan ibu hamil, serta program pembangunan IKN.
- Terdapat kebijakan warisan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, seperti ekspansi proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, pembangunan infrastruktur, dan proyek strategis nasional.

Sumber: Kementerian UU/Sekretariat Luhur MI

Prabowo. Itu mestinya dibuktikan dengan menampung serusa persen program Prabowo.

"Jika memang hendak mendukung presiden terpilih, harusnya disesuaikan kebutuhan anggarannya. Jangan sampai belum apa apasudah menyebutkan bahwa presiden terpilih melalui APBN 2025," kata Feri.

Pembacaan nota keuangan kali ini, ditekankan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puska-pol) Aditya Perdana, berada pada masa transisi pemerintahan. Masuknya para pejabat transisi, seperti Thomas Djipondong pada jabatan wakil menteri keuangan, menandakan program-program pre-

siden terpilih akan menjadi prioritas.

"Maka, kemudian kita harus percaya juga bahwa ada program yang diinginkan oleh presiden terpilih, di sisi yang lain juga ada mungkin harapan dari presiden saat ini, yaitu Jokowi, untuk bisa menyampaikan ke depannya bisa dilanjutkan atau tidak," kata Aditya.

Ia sangat yakin bahwa program prioritas pembangunan yang diharapkan Prabowo masuk struktur APBN 2025 itu diakomodasi, meski tidak akan seratus persen. "Karena tentu harus menggeser beberapa prioritas yang menjadi bagian dahulu dari pemerintahan Jokowi," tandasnya. (Try/X-10)